

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis terkait tanggung jawab hukum notaris terhadap tindakan pemalsuan terhadap akta autentik yang dibuatnya dengan cara disengaja oleh dirinya sendiri ataupun kelalaiannya. (2) menganalisis terkait penjatuhan sanksi hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam proses pembuatan akta autentik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Notaris harus bertanggungjawab atas kewenangannya. Adanya suatu tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum diluar kewenangannya, maka itu menjadi tanggungjawab pribadinya dan jabatannya. Adapun tanggungjawab hukum seorang Notaris terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik dengan cara sengaja dan kealpaan/ lalai dalam membuat akta autentik para pihak yang melakukan sebuah pelanggaran tersebut, maka Notaris dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan pidana dan perdata. (2) Penjatuhan sanksi Notaris dalam kasus tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik, maka Notaris sebagai subjek hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana dalam proses pembuktian peradilan hukum acara pidana yang diawali dengan pengaduan atau pelaporan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam majelis hakim pidana diakhiri dengan vonis atau putusan hakim sebagaimana ketentuan beracara dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Notaris sebagai pejabat publik dapat dijatuhkan sanksi administratif setelah adanya putusan pengadilan acara pidana berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris.

Kata Kunci: Tanggung jawab Hukum, Notaris, Tindak Pidana, Pemalsuan Akta

ABSTRACT

This study aims to: (1) analyze the legal responsibility of a notary for forgery of an authentic deed made intentionally by himself or by his negligence. (2) analyze regarding the imposition of legal sanctions on Notaries who commit criminal acts of forgery in the process of making authentic deeds. The research method used in this study is a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining literature or secondary data as a basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study. This normative legal research is based on primary, secondary and tertiary legal materials, namely research that refers to the norms contained in laws and regulations, books, scientific papers and others. The results of this study indicate that (1) Notaries must be responsible for their authority. The existence of an action that is an unlawful act beyond his authority, then it becomes his personal responsibility and position. As for the legal responsibility of a Notary for the crime of falsifying authentic deeds by means of intentional and negligence/negligence in making authentic deeds of the parties who committed a violation, the Notary can be held accountable on a criminal and civil basis. (2) Notary sanction is imposed in the case of the crime of forgery of authentic deeds, so the Notary as a legal subject may be subject to criminal sanctions in the proving process of criminal procedural law which begins with complaints or reports of investigations, prosecutions, and trials in the panel of criminal judges ending with a verdict or the judge's decision as stipulated in the procedural provisions in Law Number 08 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. Notaries as public officials can be subject to administrative sanctions after a criminal procedure court decision is made based on Law Number 30 of 2004, Law Number 02 of 2014 concerning the Position of Notary and Minister of Law and Human Rights Number 61 of 2021 concerning Procedures for Imposing Sanctions on Notaries.

Keyword: Legal responsibility. Notaries, Crime, Forgery of Deeds